

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2008. Hlm. 12.
- Arence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43
- Badan Pengawasan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun, *Laporan Kajian Ilmiah*, Karimun. 2018.
- Capela and Hatman dalam Burmansyah, Edy. "*Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil*". Seri kertas Kerja Institute For Global Justice (IGJ) 2009.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, 2006, hlm. 145.
- Hidayat, Syarif dan Agus Syarop Hidayat. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*. Pers, Jakarta. 2010.
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. Hlm. 3
- Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta 2010 hlm. 11

- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, 2006. hal 13
- Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011 hal. 17.
- Mardiasmo, *Perpajakan* ,Edisi Terbaru, Andi Offset, Yogyakarta, 2016 Hlm. 4-5.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung. 2010
- Mohctar Mas' oed, *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Muliono, Heri. Merajut Batam Masa Depan: *Menyongsong Status Free Trade Zone*. Pustaka LP3ES Indonesia 2001, hal. 155-156
- Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar lampung. 2009, hlm 26
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm 18.

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm 99
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, 2010. Bandung, Hlm. 1
- S.R, Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta. 2010 Hlm. 3
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm 46
- Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 8
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010. hlm. 42
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000. hlm. 20
- Sugianto. *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007.
- Utrecht dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm 25.

## **B. Undang-undang/Peraturan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam  
 Peraturan Menteri Keuangan No. 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor barang kiriman.

### C. Internet

[Dictionary.com | Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com](https://www.dictionary.com)

diakses pada tanggal 4 November 2021

[Global Justice Update - Tahun ke-6 - Edisi 2 - Juli 2008 by Buletin GJU -](#)

[Issuu](#) di Akses pada tanggal 10 Januari 2022.

<https://bcbatam.beacukai.go.id/profil/profil/> diakses pada tanggal 21

Januari 2022

<https://bpbatam.go.id/profil/latar-belakang/> diakses pada tanggal 21 Januari

2022

<https://bpbatam.go.id/profil/visi-misi/> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

<http://dewizma24.blogspot.com/2016/05/makalah-bea-cukai.html> di akses

pada tanggal 4 November 2021

[https://wiki.batam.go.id/Pemerintah\\_Kota\\_Batam](https://wiki.batam.go.id/Pemerintah_Kota_Batam) diakses pada tanggal 21

Januari 2022

[J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat](#)

[\(\[dpr.go.id\]\(http://dpr.go.id\)\)](http://dpr.go.id) diakses pada tanggal 20 January 2022

[Jdih.batam.go.id](http://jdih.batam.go.id) diakses pada tanggal 21 Januari 2022

[Kota Batam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) di akses pada

tanggal 21 Januari 2022

[Money.kompas.com](http://Money.kompas.com) diakses pada tanggal 22 januari 2022

[Pemerintah Tetapkan Dua KEK Baru di Batam](#) di akses pada tanggal 10

Januari 2022.

[UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial \[JDIH BPK RI\]](#)

diakses pada tanggal 20 January 2022

[www.kompasjakarta.com](http://www.kompasjakarta.com) diakses pada tanggal 10 Januari 2022